

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2025



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

#SalamTangguh #SalamKemanusiaan #KenaliAncamannya

#KurangiResikonya #SadarBencana #SiagaBencana

#TanggapBencana #SiapUntukSelamat

#BersinergimenghadapiBencana

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (BPBD) Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun ke satu dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2024 – 2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Program Kegiatan pada Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) 2025 ini mengacu pada Program Kegiatan pada RENSTRA tahun ke-1 dengan tetap mengoptimalkan keberlanjutan program dan kegiatan yang telah berjalan pada tahun-tahun sebelumnya serta merumuskan program/kegiatan baru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan, kondisi aktual dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA PERUBAHAN) merupakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat usulan program / kegiatan hasil musrenbang Kecamatan dan Kabupaten dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2025. Disamping itu juga untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 diharapkan dapat memberikan informasi tentang manfaat program/kegiatan yang direncanakan bagi pelayanan masyarakat.

Nanga Bulik, 30 April 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750805 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISIi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang.....1

1.2 Landasan Hukum.....3

1.3 Maksud dan Tujuan6

1.4. Sistematika Penulisan6

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 20238

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025 Penyajian menggunakan Formulir E.81 dengan format sebagai berikut8

2.2 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025Error! Bookmark not defined.

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH17

BAB IV PENUTUP46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun dokumen perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memiliki rentang waktu 3 (tiga) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode 1 (satu) tahun.

Dokumen-dokumen perencanaan daerah tersebut selanjutnya dijadikan Pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) periode waktu 3 (tiga) tahun yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA OPD) untuk waktu 1 (satu) tahun. Renja OPD saling terkait dengan dokumen RKPD dan Renstra OPD, karena didalam Renja OPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada seperti RPJMD, Renstra OPD dan RKPD. Renja OPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra OPD, dan RPJMD, bagi RKA OPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

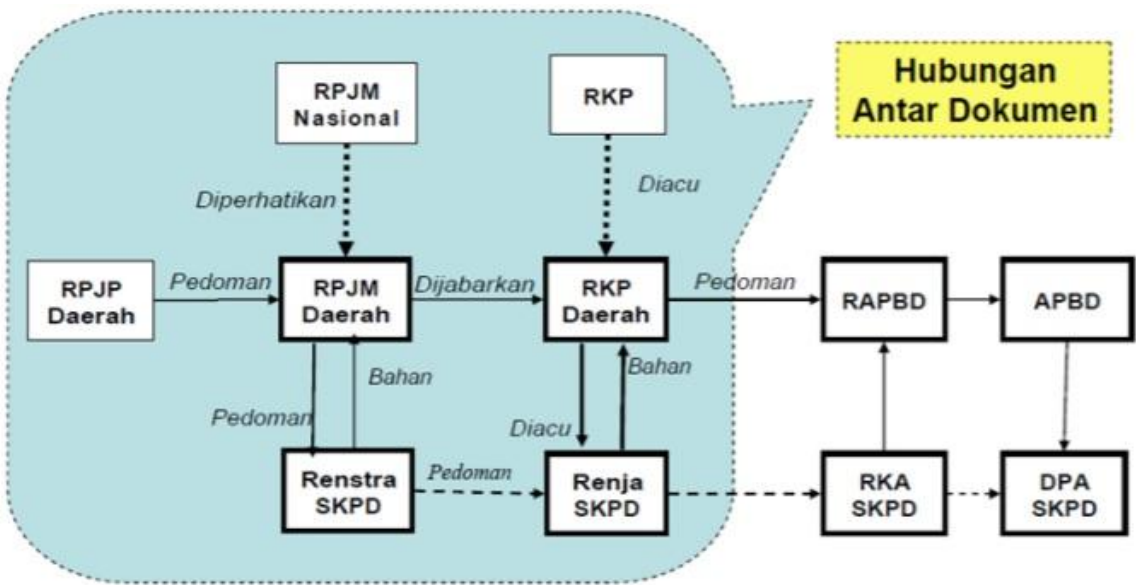
Rencana Kerja (Renja) OPD adalah dokumen perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah maupun upaya bersama dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja OPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja OPD memiliki fungsi strategis dalam sistem perencanaan daerah, karena menjadi produk perencanaan pada unit satuan kerja pemerintah yang berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat. Kualitas penyusunan Renja OPD sangat menentukan kualitas pelayanan pada publik yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Mengingat arti strategis RENJA SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA

BPBD Tahun 2024 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RENJA tahun sebelumnya dan mengacu pada RKPD Tahun berjalan;
2. Program dan Kegiatan dalam RENJA telah disesuaikan dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD Kabupaten Lamandau 2024-2026;
3. Program dan Kegiatan dalam Renja harus selaras dengan program dan kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kabupaten;
4. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Keterkaitan antara Renja BPBD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/ Kabupaten dapat digambarkan sebagai berikut:



1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau (BPBD) Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
17. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 36);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 204, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 251);
22. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 873);

23. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 Nomor 889);

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan RENJA PERUBAHAN BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan penyusunan perencanaan program/kegiatan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Tahun 2025.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuan disusunnya RENJA PERUBAHAN BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 ini adalah:

1. Sebagai bahan dalam penyusunan RKA dan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah diformulasikan dalam dokumen perencanaan daerah dan turut mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 sistematika penyusunan RENJA BPBD Kabupten Lamandau Tahun 2025 meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2019-2023
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025
Penyajian Menggunakan Formulir E.81 Dengan Format Sebagai Berikut:

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RENJA BPBD s.d Triwulan I Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

FORMULIR E.81

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

Indikator dan Target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Mengacu pada Sasaran RKPD:
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)
0,71

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				I		II		III		IV		12		13=6+12		14=13/5x100%								
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	6.190.186.118	100	6.172.142.980	100	6.945.498.872	15,64	1.086.279.974	-	-	-	-	15,64	1.086.279.974	104,51	7.258.422.954	104,51	117,26	BPBD		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100	15.000.000	100	15.000.000	100	5.460.820	25,00	1.622.000	-	-	0,00	-	0,00	-	25,00	1.622.000	125,00	16.622.000	125,00	110,81	BPBD
		a Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	15.000.000	12	15.000.000	12	5.460.820	3	1.622.000	-	-	-	-	3	1.622.000	15	16.622.000	125,00	110,81	BPBD		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	3.061.017.413	100	3.020.694.190	100	3.887.462.033	28,57	803.391.429	-	-	0,00	-	0,00	-	28,57	803.391.429	150,00	3.824.085.619	150,00	124,93	BPBD
		a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26	3.061.017.413	14	3.020.694.190	14	3.887.462.033	4	803.391.429	-	-	-	-	4	803.391.429	18	3.824.085.619	69,23	124,93	BPBD		
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	228.000.000	100	194.200.000	100	297.345.400	6,60	19.617.600	-	-	0,00	-	0,00	-	6,60	19.617.600	93,78	213.817.600	93,78	93,78	BPBD
		a Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	78.000.000	1	44.200.000	1	93.911.400	-	-	-	-	-	-	0	-	1	44.200.000	100,00	56,67	BPBD		
		b Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10	150.000.000	10	150.000.000	10	203.434.000	-	19.617.600	-	-	-	-	0	19.617.600	10	169.617.600	100,00	113,08	BPBD		
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	1.125.550.826	100	1.003.230.911	100	1.198.545.779	10,62	127.280.180	-	-	0,00	-	0,00	-	10,62	127.280.180	100,44	1.130.511.091	100,44	100,44	BPBD
		a Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	5.127.865	1	5.127.865	1	18.420.000	-	0,00	-	-	-	-	0	-	1	5.127.865	100,00	100,00	BPBD		
		b Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	415.692.961	1	350.000.000	2	410.049.100	-	17.080.750,00	-	-	-	-	0	17.080.750	1	367.080.750	50,00	88,31	BPBD		
		c Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	20.004.000	1	20.004.000	1	45.610.199	-	0,00	-	-	-	-	0	-	1	20.004.000	100,00	100,00	BPBD		
		d Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	75.000.000	1	70.000.000	1	19.685.480	-	0,00	-	-	-	-	0	-	1	70.000.000	100,00	93,33	BPBD		
		e Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	9.726.000	48	9.726.000	48	9.726.000	-	0,00	-	-	-	-	0	-	48	9.726.000	100,00	100,00	BPBD		
		f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	600.000.000	150	548.373.046	-	695.055.000	-	110.199.430,00	-	-	-	-	0	110.199.430	150	658.572.476	100,00	109,76	BPBD		
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	903.600.000	100	1.082.000.000	100	433.844.000	-	-	-	-	0,00	-	0,00	-	-	119,74	1.082.000.000	119,74	119,74	BPBD	
		a Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	125.000.000	1	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	1	600.000.000	100,00	480,00	BPBD		
		b Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18	25.600.000	1	35.000.000	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	35.000.000	11,11	136,72	BPBD		
		c Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang	2	753.000.000	1	447.000.000	2	433.844.000	-	-	-	-	-	-	0	-	1	447.000.000	50,00	59,36	BPBD		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realiasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
										I		II		III		IV										
				1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12			13=6+12	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	389.214.885	100	389.214.885	100	406.172.440	15,15	61.541.641	-	-	0,00	-	0,00	-	15,15	61.541.641	115,81	459.756.526	115,81	115,81	BPBD		
		a Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	15.000.000	12	15.000.000	12	9.920.000	3	2.000.000,00	-	-					3	2.000.000	15	17.000.000	125,00	113,33	BPBD		
		b Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	85.000.000	12	85.000.000	12	52.550.000	3	8.321.577,00	-	-					3	8.321.577	15	93.321.577	125,00	109,79	BPBD		
		c Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	289.214.885	12	289.214.885	12	343.702.440	3	51.220.064,00	-	-					3	51.220.064	15	340.434.949	125,00	117,71	BPBD		
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	467.802.994	100	467.802.994	100	716.668.400	10,16	72.827.124	-	-	0,00	-	0,00	-	10,16	72.827.124	115,57	549.630.118	115,57	115,57	BPBD		
		a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	38	433.886.875	35	433.886.875	38	642.730.000	-	72.027.124,00	-	-					0	72.027.124	35	505.913.999	92,11	116,60	BPBD		
		b Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	55	21.890.000	55	21.890.000	55	40.010.000	-	800.000,00	-	-					0	800.000	55	22.690.000	100,00	103,65	BPBD		
		c Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	12.026.119	2	12.026.119	2	33.928.400	-	0,00	-	-					0	-	2	12.026.119	100,00	100,00	BPBD		
		Meningkatnya Kesiapsiagaan dan Kesadaran Masyarakat	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah																						BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang	100	1.095.415.000	100	1.045.415.000	100	1.371.410.935	2,34	32.143.800	-	-	-	-	-	-	2,34	32.143.800	78,57	1.077.558.800	78,57	98,37	BPBD		
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi	100	150.000.000	100	150.000.000	100	304.949.970	-	-	-	-	0	-	0	-	0	-	100	150.000.000	100,00	100,00	BPBD		
		a Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	150.000.000	100	150.000.000	100	304.949.970	-	-	-	-					0	-	100	150.000.000	100,00	100,00	BPBD		
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	945.415.000	100	895.415.000	100	1.066.460.965	3,01	32.143.800	-	-	-	-	-	-	3,01	32.143.800	98,11	927.558.800	98,11	98,11	BPBD		
		a Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3	175.000.000	0	175.000.000	3	255.462.925	-	-	-	-					0	-	-	175.000.000	0,00	100,00	BPBD		
		b Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Bencana	10	125.000.000	0	125.000.000	10	205.044.000	-	-	-	-					0	-	-	125.000.000	0,00	100,00	BPBD		
		c Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	1	500.000.000	0	500.000.000	1	241.288.740	-	-	-	-					0	-	-	500.000.000	0,00	100,00	BPBD		
		d Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	2	145.415.000	0	95.415.000	2	364.665.300	-	32.143.800,00	-	-					0	32.143.800	-	127.558.800	0,00	87,72	BPBD		
		Meningkatnya kuantitas penanganan bencana	Persentase (%) kejadian bencana yang Tertangani																						BPBD	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang	100	1.115.000.000	100	1.012.094.915	100	1.549.427.500	11,35	175.801.099	-	-	-	-	-	-	11,35	175.801.099	76,67	1.187.896.014	76,67	106,54	BPBD		

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2025		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat daerah Tahun lalu (2024)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2025) yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realiasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang di Evaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										I		II		III		IV								
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=6+12	14=13/5x100%	15										
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana	100	1.115.000.000	100	1.012.094.915	100	1.549.427.500	7,25	175.801.099	-	-	-	-	7,25	175.801.099	106,54	1.187.896.014	106,54	106,54	BPBD		
		a Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPOB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	2	200.000.000	1	135.000.000	1	224.577.700	-	-	-	-	-	-	0	27.830.000	1	162.830.000	50,00	81,42	BPBD		
		b Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil ditemukan, ditolong dan di Evakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	15	165.000.000	10	150.000.000	15	165.432.000	-	8.980.000,00	-	-	-	-	0	8.980.000	10	158.980.000	66,67	96,35	BPBD		
		c Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75	750.000.000	50	727.094.915	75	1.159.417.800	-	138.991.099,00	-	-	-	-	0	138.991.099	50	866.086.014	66,67	115,48	BPBD		
		Meningkatnya rehabilitasi sarana prasarana masyarakat	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang																			BPBD		
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1. Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang	100	293.500.000	100	434.125.000	100	302.522.000	1,98	5.975.000	-	-	0,00	-	0,00	-	1,98	5.975.000	145,48	440.100.000	145,48	149,95	BPBD
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana	1	293.500.000	1	434.125.000	1	302.522.000		5.975.000	-	-	-	-	-	0	5.975.000	1	440.100.000	100,00	149,95	BPBD	
		a Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang diselesaikan	1	293.500.000	1	434.125.000	-	302.522.000	-	5.975.000	-	-	-	-	0	5.975.000	1	440.100.000	100,00	149,95	BPBD		
TOTAL				8.694.101.118	8.663.777.895	10.168.859.307	1.300.199.873	-	-	-	-	-	-	1.300.199.873	9.963.977.768	472,11								
Rata-Rata Capaian Kinerja (%)										7,83	%	37,77	%	-	%	-	%	7,83	%					
Predikat Kinerja																								
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja : Penyusunan perencanaan yang terukur dan pelaksanaan kegiatan sesuai target yang direncanakan																								
Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja : keterbatasan kompetensi SDM yang menangani perencanaan daerah																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :																								
Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Berikutnya :																								

Disusun
Nanga Bulik, Tanggal 8 April 2024
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau

HENDIKEL, ST
Pembina Tk.I / IV.b
NIP. 197508052005021003

Berdasarkan hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2023 pada Tabel 2.1.1 dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja Program/ Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Faktor Penghambat

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	FAKTOR PENGHAMBAT
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
1	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota akan dilaksanakan pada Triwulan II
2	Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota tidak terealisasi disebabkan karena tidak adanya Korban Bencana yang di evakuasi sehingga logistik bantuan tidak dapat disalurkan.
3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Legalisasi Rencana Kontijensi banjir dan karhutla masih dalam bentuk draft.
4	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terdapat beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 2
5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Terdapat beberapa kegiatan yang masih belum dilaksanakan dikarenakan kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada triwulan 2

2. Kinerja Program yang memenuhi target kinerja yang direncanakan oleh faktor-faktor pendukung keberhasilan

Tabel 2.3
Faktor Pendukung

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH		
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Ketersediaan SDM, anggaran, peserta, dan narasumber dalam pelaksanaan penatausahaan gaji dan tunjangan ASN

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
2	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Ketersediaan SDM, anggaran, peserta, dan narasumber dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Ketersediaan SDM, anggaran, dalam pelaksanaan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan bahan logistik kantor	Ketersediaan SDM, anggaran, dalam pelaksanaan penyediaan bahan logistik kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
7	Penyediaan jasa surat menyurat	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam penyediaan jasa surat menyurat
8	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik
9	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam penyediaan jasa pelayanan umum kantor
10	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
11	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
12	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Ketersediaan SDM serta anggaran dalam pelaksanaan pemeliharaan /rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		
1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	a. Melakukan Pemasangan Papan Himbauan (Papan himbawan Batingsor, Papan himbawan jembatan rusak.), kegiatan ini dilakukan dalam upaya Pencegahan terhadap bencana dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat agar berhati-hati, waspada bahwa kondisi iklim, cuaca dan wilayah saat itu rawan terjadi bencana

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung
		b. Melakukan Patroli, Sosialisasi dan Edukasi di wilayah Kabupaten Lamandau, yang dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya oleh Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Lamandau

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2 dan 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2025 yang perlu dilakukan agar seluruh program/ kegiatan pada Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dicapai secara maksimal.

2.2 Evaluasi Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah s.d Triwulan I Tahun Anggaran 2025

Visi Kabupaten Lamandau pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) periode 2025 sampai dengan 2029 yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMANDAU YANG MAJU, UNGGUL, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN BERKELANJUTAN”

Ada beberapa Misi dalam upaya pencapaian Visi dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah yang profesional, unggul, dan dinamis dengan mengedepankan e-governance dan good governance;
- 2. Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing;
- 3. Transformasi mengembangkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai potensi daerah berbasis perkebunan, perikanan, pertanian, industry, pariwisata dan bidang lainnya untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
- 4. Peningkatan fasilitas pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berkeadilan mulai dari pedesaan sampai perkotaan;
- 5. Meningkatkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, saling menghormati dan berbudaya;
- 6. Mengelola dan memanfaatkan SDA dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

Sehingga Misi yang terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau adalah Misi – 6.

Berikut disampaikan realisasi capaian Indikator Tujuan/ Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau:

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana (IRB)	82,80	76,55	71,80	48,40	85,95

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	REALISASI CAPAIAN TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	N/A	N/A	0,52	0,69	0,33

2	Persentase (%) meningkatnya kesadaran masyarakat pada daerah rawan bencana dalam menghadapi bencana.	20%	22%	21,25%	22,43%	20%
3	Persentase (%) kejadian bencana yang tertangani.	84,08%	84,06%	90,44%	90,63%	77%
4	Persentase (%) kerusakan dan kerugian sarana prasarana yang teridentifikasi dan tertangani.	39%	48%	48%	50%	65%
5	Persentase pelayanan administrasi perkantoran.	N/A	N/A	N/A	100%	100%

Analisis kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lamandau sesuai dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Lamandau merupakan ukuran keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran Strategis Instansi Pemerintah, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD yang tertuang dalam capaian Sasaran Strategis Tahun 2025.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025 pada direncanakan berjumlah **2 Program, 11 Kegiatan** dan **30 Sub Kegiatan** yang sebagian besar merupakan Program dan Kegiatan dengan total pagu dana/pagu indikatif sebesar **Rp 9.685.941.261**

Rencana Kerja (Program/Kegiatan) BPBD Kabupaten Lamandau Tahun 2025, seperti yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

MATRIKS PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Program / Kegiatan / SubKegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT																	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	6.190.186.118	6.945.498.872	7.020.662.935	75.164.063					6.895.615.472		
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketersediaan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	15.000.000	5.460.820	4.368.656	(1.092.164)					20.000.000		
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000	5.460.820	4.368.656	(1.092.164)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	20.000.000	BPBD
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	3.061.017.413	3.887.462.033	3.887.474.264	12.231					3.086.446.767		
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	78 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	26 Orang/ Bulan	3.061.017.413	3.887.462.033	3.887.474.264	12.231	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	3.086.446.767	BPBD
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						228.000.000	297.345.400	230.744.400	(66.601.000)					228.000.000		
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	78.000.000	93.911.400	93.911.400	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	78.000.000	BPBD
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang	6 Orang	10 Orang	10 Orang	6 Orang	150.000.000	203.434.000	136.833.000	(66.601.000)	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	150.000.000	BPBD
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.125.550.826	1.198.545.779	785.188.343	(413.357.436)					1.064.857.865		
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	5.127.865	18.420.000	33.374.800	14.954.800	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	5.127.865	BPBD
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	415.692.961	410.049.100	334.031.860	(76.017.240)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	350.000.000	BPBD
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.004.000	45.610.199	38.029.799	(7.580.400)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	20.004.000	BPBD
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	75.000.000	19.685.480	15.748.384	(3.937.096)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	80.000.000	BPBD

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Program / Kegiatan / SubKegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional	Daerah
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	144 Dokumen	48 Dokumen				9.726.000	9.726.000	9.726.000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	9.726.000	BPBD
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 Laporan	69 Laporan	450 Laporan	150 Laporan	70 Laporan	600.000.000	695.055.000	354.277.500	(340.777.500)	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	600.000.000	BPBD
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						903.600.000	433.844.000	990.862.432	557.018.432						1.639.292.961	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit	1 Unit	0 Unit			125.000.000	-	-	-	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	1.133.492.961	BPBD
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 paket	1 Paket	0 paket			25.600.000	-	-	-	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	42.300.000	BPBD
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan						-	-	438.643.432	438.643.432	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			BPBD	-	BPBD
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan						-	-	118.375.000	118.375.000	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	DBH Sumber Daya Alam Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)			BPBD	-	BPBD
	1.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	753.000.000	433.844.000	433.844.000	-	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	463.500.000	BPBD
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						389.214.885	406.172.440	405.356.440	(816.000)						389.214.885	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	15.000.000	9.920.000	9.920.000	-	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	15.000.000	BPBD
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	85.000.000	52.550.000	52.550.000	-	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	85.000.000	BPBD
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	289.214.885	343.702.440	342.886.440	(816.000)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	289.214.885	BPBD
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						467.802.994	716.668.400	716.668.400	0						467.802.994	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	144 unit	33 unit	38 unit			433.886.875	642.730.000	642.730.000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	433.886.875	BPBD

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Program / Kegiatan / SubKegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana				Prioritas	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							Nasional	Daerah
	1.05.01.2.09.0004	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	165 unit	19 unit	55 unit			21.890.000	40.010.000	40.010.000	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	21.890.000	BPBD
	1.05.01.2.09.0005	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	12.026.119	33.928.400	33.928.400	0	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	12.026.119	BPBD
	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN	1. Persentase Tim Reaksi Cepat (TRC) yang mendapatkan pelatihan prabencana guna						2.503.915.000	3.223.360.435	2.665.278.326	(558.082.109)						1.828.915.000	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang mendapatkan informasi dan sosialisasi kebencanaan						150.000.000	304.949.970	271.890.306	(33.059.664)						150.000.000	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	300 Orang	160 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	150.000.000	304.949.970	271.890.306	(33.059.664)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	150.000.000	BPBD
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						945.415.000	1.066.460.965	776.654.230	(289.806.735)						395.415.000	
	1.05.03.2.02.0024	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	9 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	3 Kawasan	175.000.000	255.462.925	188.381.168	(67.081.757)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	175.000.000	BPBD
	1.05.03.2.02.002	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	30 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	125.000.000	205.044.000	175.481.200	(29.562.800)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	125.000.000	BPBD
	1.05.03.2.02.002	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	2 dokumen	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	500.000.000	241.288.740	170.605.432	(70.683.308)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			BPBD	-	BPBD
	1.05.03.2.02.002	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	145.415.000	364.665.300	242.186.430	(122.478.870)	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	95.415.000	BPBD
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase meningkatnya pelayanan penanganan penyelamatan, evakuasi dan penyaluran logistik korban bencana						1.115.000.000	1.549.427.500	1.462.969.290	(86.458.210)						1.105.000.000	
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	200.000.000	224.577.700	164.375.510	(60.202.190)	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	175.000.000	BPBD
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Berhasil ditemukan, ditolong dan di Evakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	45 orang	10 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	165.000.000	165.432.000	155.832.000	(9.600.000)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	170.000.000	BPBD
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	255 orang	50 orang	75 orang	75 orang	75 orang	750.000.000	1.159.417.800	1.142.761.780	(16.656.020)	Kab. Lamandau, Bulik, Nanga Bulik	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	760.000.000	BPBD

No.	Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / SubKegiatan	Indikator Program / Kegiatan / SubKegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2024	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2025	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Bertambah /Berkurang	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas				
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025				Nasional	Daerah			
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	293.500.000	302.522.000	153.764.500	(148.757.500)						178.500.000	
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	293.500.000	302.522.000	153.764.500	(148.757.500)	Kab. Lamandau, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)			Masyarakat Kab. Lamandau	178.500.000	BPBD
TOTAL									8.694.101.118	10.168.859.307	9.685.941.261	(482.918.046)						8.724.530.472	

Nanga Bulik, April 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau

HENDIKEL, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750805 200502 1 003

BAB IV

PENUTUP

RENJA PERUBAHAN Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan Kabupaten Lamandau 2024-2026. Rencana Program dan Kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta standar pelayanan minimal berjumlah **2 Program, 11 Kegiatan** dan **30 Sub Kegiatan** dengan Rencana Anggaran pagu indikatif sebesar **Rp.9.685.941.261,-** Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur BPBD berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2025 dengan efektif dan efisien.
2. RENJA Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan sebagai langkah awal dalam penyusunan anggaran Tahun 2025, Dimana RENJA Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan program dan kegiatan BPBD, seluruh aparatur BPBD secara berjenjang, wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RENJA Tahun 2025.
4. Renja Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Nanga Bulik, 30 April 2025
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Lamandau,

HENDIKEL, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19750805 200502 1 003